

## Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era SBY dan Jokowi Dalam Dinamika Regional Asean

Iva Robiatul Adawiyah\*, Mochammad Naufal Akila Firdaus, Jofita Dewayani,  
Nadim Zuama Sahda, Rike Alfiana

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia

Email: robiatuladawiyahiva@gmail.com\*

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perbandingan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), dengan fokus pada dinamika regional ASEAN. Perbandingan ini berasal dari analisis pentingnya kerja sama internasional dan regional dalam menghadapi tantangan global, di mana Indonesia berperan proaktif sebagai pemimpin di ASEAN. Metodologi yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang berisi penjelasan dan perbandingan pendekatan diplomasi yang dilakukan pada masa SBY dan Jokowi dalam pendekatan diplomasi dan peran Indonesia di ASEAN dengan mengkaji literatur yang relevan dan beberapa studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa SBY menggunakan pendekatan multilateral dengan prinsip "thousand friends zero enemy" dan memprioritaskan hubungan baik dengan negara lain untuk meningkatkan posisi Indonesia di kancah internasional. Sebaliknya, Jokowi mengubah fokus diplomasi Indonesia dari multilateral menjadi bilateral dengan menekankan kerja sama yang berfokus pada kepentingan domestik dan pembangunan ekonomi. Perbedaan ini berdampak pada stabilitas kawasan dan peran Indonesia di ASEAN, dimana pendekatan SBY meningkatkan solidaritas ASEAN, sedangkan pendekatan Jokowi dapat melemahkan posisi Indonesia sebagai pemimpin regional.

**Kata Kunci:** Perbandingan Politik, Kebijakan Luar Negeri Indonesia, SBY, Jokowi, ASEAN

### Abstract

This study discusses the comparison of Indonesia's foreign policy under the leadership of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo (Jokowi), with a focus on ASEAN's regional dynamics. The comparison derives from the analysis of the importance of international and regional cooperation in addressing global challenges, where Indonesia plays a proactive role as a leader in ASEAN. The methodology employed is qualitative analysis, which includes explanations and comparisons of the diplomatic approaches taken during SBY's and Jokowi's administrations by reviewing relevant literature and several case studies. The findings show that SBY adopted a multilateral approach with the principle of "a thousand friends, zero enemy," prioritizing good relations with other countries to enhance Indonesia's position on the international stage. In contrast, Jokowi shifted Indonesia's diplomatic focus from multilateral to bilateral relations, emphasizing cooperation centered on domestic interests and economic development. These differences have implications for regional stability and Indonesia's role in ASEAN, where SBY's approach strengthened ASEAN solidarity, while Jokowi's approach may weaken Indonesia's position as a regional leader.

**Keywords:** Political Comparison, Indonesia's Foreign Policy, SBY, Jokowi, ASEAN

## PENDAHULUAN

Kerjasama regional dan internasional tentu menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Organisasi regional di Asia Tenggara, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) hadir sebagai wadah untuk menjembatani kerjasama antar anggotanya (Abidin et al., 2016; Antona-Makoshi et al., 2023; Burgess, 2023; Efendi et al., 2018; Hotez et al., 2015; Peltzer et al., 2017). ASEAN berdiri dengan tujuan untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di tingkat regional, meningkatkan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya negara-negara anggota, serta memperluas peluang untuk diskusi damai tentang perbedaan pendapat (Gischa, n.d.). ASEAN terdiri dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste yang belum memiliki keanggotaan penuh di ASEAN (Arieza, 29 C.E.). Dengan adanya berbagai negara yang menjadi anggota ASEAN menjadikan organisasi ini diliputi dengan berbagai dinamika regional dari berbagai aspek. Dinamika tersebut mendorong negara-negara anggota terutama Indonesia untuk menentukan kebijakan luar negerinya guna merespon hal tersebut.

Indonesia yang merupakan salah satu anggota dari ASEAN, tentu ASEAN memiliki peran penting dalam penerapan kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri Indonesia akan tetap berdasar oleh prinsip “bebas-aktif”, prinsip tersebut berarti bahwa Indonesia tidak berpihak pada suatu kekuatan besar dan aktif dalam menjaga ketertiban dunia (Enggartias Wahana Putera, n.d.). Selain itu, Indonesia harus mempertimbangkan kekuatan negaranya untuk digunakan sebagai *bargaining value* dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Indonesia juga harus mempertimbangkan banyak hal untuk menjadi kekuatan nasional. Kekuatan nasional Indonesia itu nanti akan membantu jalannya proses hubungan internasional, karena kekuatan tersebut yang menentukan keberhasilan suatu interaksi. Setiap aktor memiliki kekuatan yang berbeda, semakin besar kekuatan seorang aktor, akan semakin mudah kekuatannya untuk menjadi pemimpin dalam hubungan internasional (Enggartias Wahana Putera, n.d.).

Contohnya, pada era SBY dan Joko Widodo, kedua pemimpin ini membawa Indonesia dalam bersikap di dunia internasional dengan kebijakan luar negeri masing-masing. Pada periode pertama kepemimpinannya (2004-2009), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerapkan kebijakan luar negeri pragmatis dan aktif dalam diplomasi global untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia. Dengan prinsip “*thousand friends zero enemy*,” SBY mendorong hubungan baik dengan berbagai negara tanpa mengorbankan kepentingan nasional (Isabela, 2022). Indonesia juga aktif dalam forum multilateral seperti ASEAN, G20, dan PBB, memperkuat posisinya sebagai wakil negara berkembang (Effendi, n.d.). SBY mengutamakan peran strategis Indonesia dalam perdamaian regional, keamanan, ekonomi global, dan membangun citra sebagai negara yang bertanggung jawab dan etis.

Sementara pada era Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terhadap ASEAN, lebih berfokus pada kepentingan ekonomi domestik. Jokowi mengutamakan kerjasama ekonomi bilateral yang memberikan manfaat langsung bagi Indonesia, terutama di bidang investasi dan infrastruktur. ASEAN tidak lagi menjadi prioritas utama atau alat utama bagi Indonesia untuk mempromosikan pengaruh di kawasan, meski Jokowi tetap mendukung peran ASEAN dalam menjaga stabilitas regional (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Luar Negeri, 2003). Jokowi juga memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia untuk menjaga keseimbangan kekuatan serta memaksimalkan keuntungan ekonomi dan geopolitik bagi Indonesia (Dkk., n.d.).

Penelitian yang relevan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Aji Widiatmaja dan Ulul Albab yang berjudul “*Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional*”. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Penelitian tersebut membantu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kebijakan luar negeri Indonesia dibawah masing-masing kepemimpinan dan posisi Indonesia di forum global (Alvian et al., 2017; Amin Aminuddin, 2022; Cindytia Rudianto, 2020; Hartiana et al., 2020; Sulistiyani & Mukaromah, 2018; Widiatmaja & Albab, 2019). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rizky Alif Alvian, dkk yang berjudul "*Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo*" juga memiliki keterikatan dengan topik penelitian penulis. Penelitian tersebut menguraikan Indonesia sebagai negara *Middle Power* mengalami perubahan dalam strategi diplomasinya dibawah kepemimpinan SBY dan Jokowi. Ditangn Joko Widodo, Indonesia berupaya mempengaruhi atau menciptakan aturan dalam politik internasional. Sementara ditangan SBY, Indonesia lebih fokus pada keuntungan dengan mematuhi norma yang ada (Alvian, n.d.).

Dari tinjauan literatur tersebut kemudian muncul permasalahan penelitian terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di bawah rezim SBY dan rezim Jokowi periode pertama dalam menempatkan negaranya dalam dinamika regional, khususnya ASEAN dan strategi Indonesia dalam berdiplomasi di tingkat regional. Penelitian sebelumnya belum membahas secara lebih spesifik akan dua hal tersebut. Untuk menguraikan terkait dua hal tersebut, pertama-tama artikel ini akan mengulas strategi diplomasi yang dipakai oleh kedua pemimpin dalam menyikapi dinamika di ASEAN. Selanjutnya artikel ini akan menjelaskan terkait peran Indonesia di lingkup regional dengan kebijakan luar negeri kedua pemimpin, SBY dan Jokowi di periode pertama mereka dan dilanjutkan pandangan penulis terkait hasil temuan penelitian. Kemudian artikel ini ditutup dengan kesimpulan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap pendekatan diplomasi dan peran Indonesia di ASEAN pada masa SBY periode pertama (2004-2009) dan Jokowi periode pertama (2014-2019). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan proses pendekatan diplomasi yang dilakukan SBY dan Jokowi, peran Indonesia di ASEAN pada tahun 2004-2009 dan 2014-2019 yang dapat mempengaruhi posisi Indonesia di tingkat regional. Data dikumpulkan melalui analisis data sekunder. Data sekunder yang diambil menggunakan jurnal akademis, buku, laporan media, artikel berita terkait, dan analisis kebijakan yang digunakan juga untuk membandingkan konteks perbandingan politik topik yang dianalisis. Sumber-sumber data yang dipilih karena relevan dengan topik pendekatan diplomasi dan peran Indonesia di ASEAN pada kedua pemimpin Indonesia.

Data yang dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi dan komparatif. Dalam analisis isi, tema yang berkaitan dengan proses pendekatan diplomasi dan peran Indonesia di ASEAN berasal dari dokumen-dokumen dan sumber-sumber sekunder. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan cara pengambilan keputusan menurut kebijakan yang diambil oleh kedua pemimpin, dengan fokus pada perbedaan pendekatan diplomasi dan peran Indonesia di ASEAN. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola dalam proses politik yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang diambil oleh SBY dan Jokowi. Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi konsep, penjelasan dan perbandingan pendekatan diplomasi dalam sebuah permasalahan penelitian. Metode ini didasarkan pada struktur politik dan hasil kebijakan, serta menggambarkan bagaimana perbedaan dalam konteks politik dapat menguntungkan bagi Indonesia dalam masa kepemimpinan SBY dan Jokowi.

Penelitian ini menekankan pentingnya memahami peran Indonesia sebagai salah satu aktor utama yang berdampak di kawasan regional ASEAN pada masa kepemimpinan SBY

(2004-2009) dan Jokowi (2014-2019). Keterbatasan penelitian ini terletak pada terbatasnya data primer mengenai analisis kebijakan luar negeri Indonesia di ASEAN karena peneliti mengambil dari jurnal-jurnal yang pernah meneliti topik tersebut sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian ini menawarkan wawasan yang mendalam berdasarkan data yang tersedia untuk umum dan literatur akademis yang relevan. Etika penelitian dijaga dengan memastikan bahwa semua sumber yang dikutip berasal dari dokumen yang tersedia untuk umum dan menghindari pelanggaran privasi atau informasi rahasia. Metode ini dirancang untuk memberikan analisis komprehensif tentang perbedaan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah rezim SBY dan rezim Jokowi periode pertama dalam menempatkan negaranya dalam dinamika regional, khususnya ASEAN dan strategi Indonesia dalam berdiplomasi di tingkat regional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis suatu proses kebijakan luar negeri pada era SBY dan Jokowi, serta menganalisis pendekatan diplomasi dan peran Indonesia di ASEAN, perlu untuk memahami cara pengambilan Keputusan yang dilakukan oleh kedua pemimpin tersebut. Kedua pemimpin memiliki tujuan yaitu menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi actor yang berperan secara signifikan di kawasan regional ASEAN. Penelitian ini memberikan analisis komparatif yang terperinci mengenai perbandingan SBY dan Jokowi dalam melakukan pendekatan diplomasi dan peran Indonesia di ASEAN melalui cara mereka masing-masing sesuai masa kepemimpinan mereka.

### Pendekatan Diplomasi

Dalam kurun waktu masing-masing periode kepemimpinan, kebijakan diplomasi suatu negara kerap mengalami perubahan sesuai dengan visi, misi, serta tantangan global dan regional yang sedang dihadapi. Di Indonesia, kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode pertama (2004-2009) dan Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama (2014-2019) menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menjalankan diplomasi, baik di tingkat regional maupun internasional.

Pada masa kepemimpinan SBY, menggunakan slogan diplomasi “*thousand friends zero enemy*”, menjelaskan adanya upaya untuk menghindari konflik langsung dengan negara lain dan menempatkan Indonesia sebagai negara aktif dan terpandang pada kancah internasional (Utari, S., 2021). Slogan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih memakai soft powernya, yakni pengaruh yang dibangun melalui kerja sama dan diplomasi, dibandingkan menggunakan kekuatan militer. Pembangunan citra positif Indonesia, dilakukan SBY dengan menggunakan momen-momen penting pada forum internasional. Dengan membuat Indonesia hadir sebagai aktor yang dapat diandalkan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Dalam lingkup ASEAN, SBY mengambil sikap proaktif dengan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam berbagai inisiatif multilateral yang bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan. Indonesia di bawah kepemimpinan SBY juga berperan dalam memperkuat ASEAN sebagai Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN). Pendekatan ini ditujukan untuk memperkecil campur tangan negara-negara besar di luar ASEAN, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kedaulatan negara-negara anggota. Salah satu contoh dari langkah ini adalah peran Indonesia dalam mengurangi ketegangan di Laut Cina Selatan, yaitu ketika SBY mencoba menengahi perselisihan di antara negara-negara ASEAN yang terlibat dalam klaim dengan Cina, guna mencari solusi damai yang tidak mengorbankan solidaritas ASEAN (Adielah, 2023).

Strategi multilateral SBY ini tidak terbatas pada lingkup ASEAN saja, melainkan juga

meluas ke berbagai forum internasional lainnya seperti APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) dan East Asia Summit (EAS) (Widiatmaja & Albab, 2019). Melalui partisipasi di forum-forum tersebut, Indonesia semakin memperluas pengaruhnya dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam dinamika kawasan Asia Pasifik. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, SBY menegaskan pentingnya kolaborasi dan kerja sama di antara negara-negara di wilayah ini untuk mengatasi tantangan bersama seperti perubahan iklim, keamanan energi, dan ketidakstabilan ekonomi. Dengan terlibat aktif di forum multilateral, Indonesia tidak hanya memperkuat posisinya di ASEAN, namun juga sebagai aktor yang relevan di dunia internasional yang lebih luas.

Sedangkan pada masa kepemimpinan presiden Jokowi, pendekatan diplomasi Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup jelas, dimana awalnya berfokus pada multilateral menjadi bilateral. Pencapaian kepentingan nasional yang nyata dan dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Indonesia menjadi fokus dari diplomasi yang dilakukan pada era kepemimpinan presiden Jokowi ini. Diplomasi dengan melihat bahwa harus memberikan dampak nyata pada pembangunan dalam negeri, terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi hingga percepatan pembangunan infrastruktur. Agar tercapainya kepentingan nasional ini, pemerkuatkan kerja sama bilateral dengan negara-negara besar seperti Tiongkok, dipilih menjadi langkah nyata Jokowi daripada mengandalkan kerja sama multilateral. Memprioritaskan keuntungan langsung untuk rakyat, Jokowi menunjukkan bahwa diplomasi dapat diintegrasikan dengan program-program pembangunan nasional yang berdampak nyata yang didasarkan pada prinsip diplomasi "*down-to-earth*" (Andika, 2016).

Jokowi juga mencoba untuk mengubah pendekatan diplomasi Indonesia ke arah yang lebih cepat, lebih efisien dan lebih berdampak. Menurutnya, kerja sama bilateral lebih dapat memberikan hasil yang nyata dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan pendekatan multilateral yang seringkali membutuhkan proses yang panjang dan kesepakatan dari berbagai pihak. Karena itu, Jokowi secara aktif menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara yang mempunyai kemampuan dan ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia, misalnya Tiongkok yang menjadi salah satu investor terbesar dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia (Mardhiyyah, I., & Suryadipura, 2023), seperti jalan tol, pelabuhan, dan kereta api. Langkah ini sejalan dengan visi Jokowi untuk mendorong percepatan pembangunan nasional dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan kerja sama bilateral ini, Jokowi percaya bahwa hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan bilateral yang diutamakan oleh Jokowi sekaligus memperlihatkan bahwa Indonesia menjalankan politik luar negeri yang lebih fokus pada kepentingan domestik dan pragmatis. Jokowi meyakini bahwa partisipasi dalam forum multilateral terkadang tidak sejalan dengan kepentingan dan urgensi domestik yang lebih mendesak. Seperti contohnya, Jokowi lebih memilih untuk fokus pada perjanjian perdagangan yang menguntungkan Indonesia secara langsung, daripada terlibat dalam pembangunan konsensus regional yang memakan waktu. Kebijakan ini tercermin dalam kebijakan Jokowi yang lebih memilih untuk lebih selektif dalam mengikuti pertemuan-pertemuan internasional, dengan mengutamakan forum-forum yang membantu pembangunan ekonomi dalam negeri, seperti APEC Tiongkok 2014, yang menjadi konferensi internasional pertama yang dihadiri oleh Jokowi pada masa kepemimpinannya (Wedhaswary, 2015).

Perbedaan dasar antara pendekatan multilateral SBY dan pendekatan bilateral Jokowi masing-masing memberikan kekuatan dan kelemahan, terlebih lagi dalam konteks ASEAN yang dihadapkan pada isu-isu kompleks seperti sengketa Laut Cina Selatan. Pada pendekatan SBY yang berfokus multilateralisme ini menekankan pentingnya dialog dan resolusi damai yang melibatkan semua negara anggota ASEAN. Hal ini membantu ASEAN menjaga

persatuan dalam menghadapi kekuatan-kekuatan besar seperti Cina dan Amerika Serikat. Di sisi lain, pendekatan bilateral Jokowi yang terkesan selektif dalam keterlibatan ASEAN dapat melemahkan mekanisme kolektif ASEAN, terutama ketika ASEAN perlu membentuk sikap bersama dalam menghadapi ancaman eksternal. Dengan berkurangnya peran Indonesia dalam pembangunan kesepakatan, solidaritas ASEAN dalam isu-isu strategis dapat terpengaruh, yang pada akhirnya akan melemahkan posisi ASEAN dalam menghadapi tantangan bersama.

Implikasi dari perbedaan pendekatan ini juga dapat terlihat pada stabilitas kawasan dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Sebagai pemimpin ASEAN selama beberapa dekade, Indonesia dianggap sebagai penggerak utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan regional. Pendekatan multilateral SBY memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar dan mendorong ASEAN untuk tetap netral dan bersatu dalam menghadapi tantangan eksternal. Di sisi lain, meskipun pendekatan bilateral Jokowi memberikan lebih banyak keuntungan domestik, pendekatan ini meremehkan posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dengan visi kolektif untuk kawasan ini. Jika keterlibatan Indonesia di ASEAN berkurang, maka pengaruhnya sebagai pemimpin ASEAN dapat melemah, yang berpotensi meningkatkan intervensi kekuatan besar di kawasan ini. Jika keterlibatan Indonesia di ASEAN berkurang, maka pengaruhnya sebagai pemimpin ASEAN dapat melemah, yang berpotensi meningkatkan intervensi kekuatan besar di kawasan ini.

### **Peran Indonesia di ASEAN**

Adanya perbedaan cara pandang SBY dan Jokowi membuat Indonesia harus menyeimbangkan posisi Indonesia dalam berperan di ASEAN. Indonesia pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menampilkan kebijakan luar negeri yang proaktif dan *High Profile*. Hal ini dapat dibuktikan dengan safari politik yang dilakukan oleh SBY yang bertujuan untuk meningkatkan citra positif Indonesia di lingkup internasional. Dengan slogan *“thousand friend zero enemy”*, SBY berusaha untuk menunjukkan posisi Indonesia di kancah internasional sangat penting. Pada periode pertamanya (2004-2009), SBY mengunjungi Malaysia dan Singapura sebagai negara anggota ASEAN sekaligus tetangga terdekat Indonesia. Selain itu, SBY juga berkunjung ke Selandia Baru, Australia, dan Timor Leste (Inayat, 2016). Hal tersebut sebagai tanda “perkenalan” dalam rangka upaya diplomasi yang akan datang. SBY pernah berkata bahwa *“no country perceives Indonesia as an enemy and ther is no country which Indonesia considers an enemy. Thus, Indonesia can exercise its foreign policy freely in all direction, having a million friends and zero enemies”* (Rizky Alif Alvia, Ganesh Cintika Putri, n.d.). Kutipan tersebut bermakna bahwa Indonesia merupakan negara yang mendorong kerja sama konstruktif dengan negara manapun dan Indonesia merupakan negara yang tidak gemar berkonflik.

Berdasarkan fakta tersebut dapat diambil kesimpulan jika SBY memulai hubungan internasional dengan negara anggota ASEAN dan negara sekitar ASEAN. Hal ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia sejak orde baru yakni, *Concentric Circle Formula*. Konsep ini kemudian menjadikan ASEAN terletak pada concentric circle yang pertama serta berfungsi sebagai corner stone politik luar negeri Indonesia. Lingkaran kedua, terdapat negara-negara yang tergabung dalam Pacific Island Forum dan the South West Pacific Dialogue. Terdapat juga Konsultasi Tripartite antara Indonesia, Timor Timor, dan Australia. Dalam lingkaran konsentris kedua ini terdapat ASEAN + 3 yang meliputi Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan dalam lingkaran ketiga, lebih terfokus pada kerja sama dengan negara ekonomi mapan seperti Amerika dan Uni Eropa. Dalam kasus Laut China Selatan (LCS), Indonesia dibawah pemerintahan SBY berperan sebagai mediator yang menekankan pada resolusi atau penyelesaian sengketa secara damai. Hal ini merupakan

panggilan moral Indonesia untuk berperan secara aktif dalam menyelesaikan sengketa di LCS (Gunawan, n.d.).

Dalam kasus lain yaitu isu terorisme, SBY memberikan citra Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia sebagai negara yang menentang dan menolak aksi terorisme dengan mengatasnamakan islam. Indonesia mencoba membuktikan kepada dunia internasional bahwa tidak semua yang beragama islam itu teroris. SBY turut berpartisipasi di berbagai forum internasional yang menentang terorisme, seperti menjadi ketua *APEC Counter Terrorism Task* dan memainkan berbagai peran penting untuk membangun keomunikasi dengan negara-negara yang bukan mayoritas islam untuk membangun legitimasi atau kepercayaan terhadap islam. SBY memberikan penekanan bahwa islam menentang segala bentuk tindakan ekstrimisme yang disampaikan dalam beberapa kesempatan. Terpilihnya SBY memberikan harapan baru terciptanya pemerintahan Indonesia yang lebih baik dan berperan aktif dalam perpolitikan hubungan internasional.

SBY juga menawarkan kerja sama New Asia-African Strategic Partnership (NAASP) di KTT ke-50 pada April 2005. Terdapat tiga strategi utama dalam politik luar negeri SBY menurut Rizal Sukma. Pertama, adalah fokus Indonesia dalam memprioritaskan pembentukan komunitas regional dengan menekankan pada multilateralisme. Hal tersebut dibuktikan dengan peran aktif Indonesia dalam forum-forum multilateral seperti ASEAN + 3, East Asia Summit (EAS), dan APEC. Yang kedua, fokus politik luar negeri SBY di titik beratkan pada hubungan-hubungan bilateral dengan negara-negara major dan regional power meliputi Cina, Korea Selatan, Amerika, dan Jepang. Ketiga, fokus Indonesia dalam upaya aktif dan berkontribusi terhadap masaah-masalaah global seperti perubahan iklim, pangan, energi, dan pangan (Saputra, 2012). Hal tersebut dilakukan oleh SBY dalam rangka mewujudkan citra positif Indonesia di mata dunia. Efek dari penguatan citra positif dapat meningkatkan kepercayaan negara lain dalam menjalin kerja sama dengan Indonesia. SBY telah membangun banyak kedekatan dengan negara-negara ASEAN dan di sekitar ASEAN yang diwujudkan dalam bingkai *strategic partnership* atau *comprehensive partnership*. Hal ini dapat membuat kerja sama lebih terstruktur dan terukur. Prinsip “*thousand friend zero enemy*” merupakan proyeksi soft power Indonesia guna mewujudkan citra positif di dunia internasional yang akan berguna dalam membangun kerja sama yang konstruktif.

Berbanding terbalik di era Presiden Joko Widodo, kebijakan luar negeri Indonesia memiliki perbedaan yang cukup signifikan yang mempengaruhi peran Indonesia baik di kancah internasional ataupun dalam lingkup regional ASEAN. Banyak kalangan menilai dan memiliki pandangan bahwa kebijakan luar negeri era Jokowi lebih bersifat “*inward looking*” yang memfokuskan kepada dinamika dalam negeri. Salah satu faktor adanya perbedaan gaya kepemimpinan tersebut ialah karena perbedaan latar belakang dari kedua presiden tersebut. SBY yang memiliki latar belakang militer dan terbiasa dengan forum-forum internasional berbeda dengan Jokowi yang belum terbiasa dengan forum-forum internasional. Jokowi menerapkan *Down to Earth diplomacy* terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Secara garis besar, dapat diartikan segala bentuk kerja sama difokuskan kepada kepentingan nasional terutama dalam bidang ekonomi. (Connelly) Hal tersebut menunjukkan bahwa Jokowi tidak berfokus pada pembentukan citra di internasional dan Jokowi juga menginginkan hasil yang cepat dari kerja sama internasional yang dilakukan oleh Indonesia.

Terkait dengan isu keamanan kawasan seperti terorisme dan sengketa Laut Cina Selatan, profil Jokowi tidak sekuat SBY sewaktu menjadi presiden. Sebagai contoh dalam kasus terorisme, Jokowi tidak terlalu aktif dan vokal dalam forum-forum internasional yang menentang tindakan terorisme. Jokowi cenderung mendelegasikan forum-forum tersebut kepada kementerian terkait seperti menteri luar negeri dan menteri pertahanan. Peningkatan kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina dan kemunculan ISIS turut meningkatkan intensitas pertemuan dan komitmen para pemimpin di kawasan baik bilateral maupun multilateral.

Peran tersebut tidak langsung dimainkan oleh Jokowi contoh, kerja sama di tingkat kawasan ASEAN yang membentuk *Our Eyes*, merupakan kerja sama pertukaran informasi strategis dalam rangka meningkatkan keamanan kawasan yang diprakarsai oleh enam menteri pertahanan negara ASEAN, termasuk Indonesia pada 2018 (Pertahanan, n.d.). Sedangkan dalam isu LCS, Indonesia tidak memainkan peran yang sentral dibawah kepemimpinan Jokowi. Akibat dari turunnya peran Indonesia di kawasan ASEAN dalam isu LCS membuat kondisi semakin memanas. Dengan dibangunnya pangkalan militer China di Natuna yang kemudian diikuti oleh Indonesia menandakan mekanisme yang terdapat di ASEAN tidak berjalan.

Jokowi kenyataannya lebih menampilkan model kepemimpinan yang berfokus kepada kepentingan nasional. Terdapat empat indikator yang mengkonstruksi kebijakan luar negeri Jokowi bersifat *inward looking*. Pertama, terkait dengan prinsip dan tujuan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif. Implementasi dari prinsip ini dapat terbaca dari visi misi dari Jokowi yang menginginkan Indonesia berdaulat, mandiri, dan gotong royong. Kemudian, Jokowi juga memberikan prioritas pada empat elemen terhadap perlindungan WNI/TKI diluar negeri, perlindungan SDA dan perdagangan, produktivitas perekonomian, dan keamanan dan pertahanan nasional. Kedua, yakni konstelasi politik internasional dan regional. Seperti dalam hal perkembangan lingkungan strategis global dan regional, Indonesia cukup baik dalam merespons terutama terkait dengan isu ekonomi dan keamanan. (Situmorang) Ketiga, perubahan yang terjadi dalam politik domestik yang cukup menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Pemerintah terus memperhatikan beberapa masalah saat demokrasi semakin kuat setelah reformasi. Penegakan hukum dan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan penguatan institusi demokrasi adalah beberapa dari masalah tersebut. Sebenarnya, meningkatkan aspek-aspek ini dapat bermanfaat bagi reputasi Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Keempat, gaya kepemimpinan Joko Widodo yang didasarkan pada konsep Rational Action Model (RAM). RAM mengatakan bahwa para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan politik, khususnya Presiden Joko Widodo harus menguasai masalah nasional, baik internal maupun eksternal, sebagai modal analisis untuk mengambil kebijakan. Warna kebijakan luar negeri Indonesia saat ini cenderung *inward-looking* dipengaruhi oleh latar belakang Presiden Joko Widodo yang kekurangan pengalaman dalam perpolitikan internasional. Namun, meskipun kebijakan luar negeri Jokowi lebih bersifat *inward looking*, berbeda dengan SBY yang mengedepankan citra positif. Upaya penenggelaman kapal-kapal asing yang mencuri ikan dan keaktifan dalam forum-forum internasional seperti APEC menjadi indikator *outward looking* era Jokowi. Namun tetap didasarkan pada pragmatisme, *no profit no deal* (Hamzah, 2015).

Model kepemimpinan SBY dengan Jokowi menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kebijakan luar negeri SBY sangat mengedepankan kepada citra melalui slogan *thousand friend zero enemy* untuk membuat Indonesia aktif di kancah politik global. SBY memunculkan kekuatan *soft power* yang berdasar pada budaya dan nilai-nilai politik yang menjunjung tinggi moralitas. Perannya tersebut telah membawa Indonesia sebagai *Leader* di kawasan ASEAN dengan dibuktikan oleh keaktifan dan memprakarsai beberapa kerja sama serta peran Indonesia yang menjadi mediator dalam isu Laut Cina Selatan. Sebaliknya, model kepemimpinan Jokowi dalam kebijakan internasional memiliki dampak yang nyata pada masyarakat Indonesia. Ini dapat dilihat dari kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) yang bertujuan untuk meningkatkan sektor maritim Indonesia, peningkatan perlindungan bagi WNI/TKI di luar negeri, dan proyek infrastuktur sebagai pemerataan pembangunan. Pada dasarnya, Presiden Joko Widodo memiliki skeptis terhadap pertemuan multilateral karena Jokowi berpikir bahwa pertemuan semacam itu membutuhkan banyak waktu dan tidak menghasilkan hasil yang jelas. Akibatnya, Jokowi tidak terlalu menyukai pertemuan

multilateral kecuali jika hasilnya langsung berdampak pada Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa peran Indonesia di ASEAN telah menurun, yang menyebabkan proses pembentukan standar dan konsensus di setiap pertemuan ASEAN. Hal ini yang menjadikan Indonesia pada pemerintahan Jokowi periode (2014-2019) sebagai *participant* di kawasan.

### Analisis

Dari pembahasan yang telah dijelaskan, perbedaan pendekatan dalam kebijakan luar negeri Indonesia di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan pergeseran signifikan dalam pendekatan diplomasi dan peran Indonesia di ASEAN. Hal ini mencerminkan bagaimana perbedaan setiap pemimpin Indonesia dalam mengelola hubungan negara dalam konteks regional ASEAN dan menunjukkan berbagai pendekatan yang diambil masing-masing pemimpin. Jika topik ini dianalisis dengan merujuk pada buku Powell yang berjudul "*Comparative Politics*", pada sub bab *The Policy Level: Performance, Outcome, and Evaluation* (Bingham Powell et al., 2015) yakni:

Pada policy performance yang telah dimunculkan oleh setiap presiden adalah, saat masa kepemimpinan SBY, Indonesia tampil sebagai negara yang proaktif dalam forum-forum internasional dan ASEAN. Mengusung slogan diplomasi "*Million Friends, Zero Enemy*," SBY mengambil pendekatan diplomasi ini guna mendorong Indonesia menjadi negara yang aktif di kancah internasional dengan menghindari konflik dan mempererat hubungan melalui Kerjasama multilateral (Utari, S., 2021). Dalam peran Indonesia di ASEAN, SBY berupaya menempatkan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN yang proaktif dalam menjaga kesatuan dan solidaritas ASEAN untuk mengatasi tantangan, dimana SBY mendorong resolusi damai tanpa campur tangan kekuatan besar dengan strategi "*thousand friend zero enemy*." (Inayat, 2016).

Sementara pada masa kepemimpinan Jokowi pendekatan diplomasi Indonesia bergeser dari multilateral ke bilateral, dengan focus utama pada kepentingan ekonomi domestik sebagai prioritas utama, investasi dan pembangunan infrastruktur (Andika, 2016). Jokowi tertarik untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kemampuan dan minat untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Tiongkok dalam kerjasama pembuatan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) (Suhendra, 2015). ASEAN tidak lagi menjadi prioritas utama, dan Jokowi lebih selektif dalam keterlibatan pada pertemuan internasional, yang mengurangi peran Indonesia sebagai pemimpin regional ASEAN, dan lebih berfokus pada kepentingan dalam negeri terutama di bidang ekonomi dan perlindungan WNI (Connelly). Kebijakan luar negeri Jokowi cenderung bersifat *inward-looking* memprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan dan keamanan nasional. Meskipun tetap mendukung peran ASEAN, Jokowi lebih selektif dalam menghadiri pertemuan multilateral dan memprioritaskan kepentingan langsung Indonesia, seperti maritim dan infrastruktur. (Situmorang).

Hasil dari kebijakan yang telah dilakukan (*policy outcomes*) dari masing-masing era kepemimpinan yakni, saat kepemimpinan SBY beliau memperkuat ASEAN sebagai *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (ZOPFAN), sikap ini bertujuan mengurangi campur tangan kekuatan besar di luar ASEAN dalam urusan internal kawasan terkait isu Laut Cina Selatan (Adielah, 2023). SBY memperluas diplomasi Indonesia ke forum internasional seperti *East Asia Summit* (EAS) dan APEC yang mana kerja sama menghadapi isu global seperti perubahan iklim dan keamanan energi (Widiatmaja & Albab, 2019). Selain itu SBY juga menggagas Kerjasama *New Asia-African Strategic Partnership* (NAASP) dalam mengukuhkan peran Indonesia sebagai mediator di Kawasan. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan citra positif Indonesia di mata dunia (Saputra, 2012).

Sedangkan hasil kebijakan (*policy outcomes*) sat era Jokowi, dari Kebijakan luar

negeri Jokowi yang bersifat *inward-looking*, memiliki hasil yakni investasi China kepada Indonesia sebesar US\$ 63,4 miliar dengan kepemilikan saham sebesar 40% dalam pembangunan KCIC (Suhendra, 2015). Melalui prinsip "down-to-earth diplomacy" Jokowi memastikan bahwa setiap kerja sama internasional memberikan manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia (Andika, 2016), contohnya pada sektor maritim dan pembangunan infrastruktur (Situmorang).

Hal tersebut terlihat jelas bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) menghadirkan pendekatan diplomasi yang berbeda dalam membangun peran Indonesia di ASEAN dan kancan internasional. Hingga memunculkan Evaluasi yang melibatkan penilaian kinerja kebijakan berdasarkan berbagai elemen seperti kesejahteraan, keamanan, dan keadilan (Bingham Powell et al., 2015). Dimana era kepemimpinan Jokowi dinilai lebih efektif, sebab mengedepankan pembangunan nasional dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia dengan kerja sama bilateral, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik yang berdampak langsung pada kesejahteraan Masyarakat (Wedhaswary, 2015), Selain itu perbaikan perlindungan WNI di luar negeri menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga hak warga negara. Sedangkan era SBY hanya berfokus pada *Outward-looking* dengan mengedepankan *soft power* untuk menjadikan Indonesia sebagai *Leader* di kawasan ASEAN. SBY dianggap berhasil membangun citra positif Indonesia di kancan internasional. Namun, dinilai kurang berdampak nyata bagi kepentingan strategis Indonesia, sehingga memunculkan banyak kritik pada kepemimpinannya, bahwa langkah yang diambil hanya melakukan *ego trip* tanpa hasil yang konkret (Widiatmaja & Albab, 2019).

## KESIMPULAN

Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) memiliki perbedaan yang signifikan dalam pendekatan diplomasi dan peran Indonesia terhadap ASEAN. Dalam masa kepemimpinannya, SBY membawa prinsip "*thousand friend zero enemy*" yang menekankan diplomasi kerja sama internasional dan peran Indonesia di ASEAN untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dominan di kancan global. Sebaliknya, pada masa kepemimpinan Jokowi lebih fokus pada kepentingan domestik melalui pendekatan bilateral yang pragmatis. Jokowi lebih mengutamakan kerja sama ekonomi dengan negara-negara besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Secara praktis, pendekatan lebih inklusif yang dilakukan SBY dapat memperkuat komitmen di ASEAN dan posisi Indonesia sebagai pemimpin regional. Namun, pendekatan lebih selektif yang diterapkan Jokowi dapat melemahkan struktur ASEAN dan menurunkan kekuatan Indonesia di forum ASEAN. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk masa depan sebagai evaluasi dari kebijakan luar negeri era SBY dan Jokowi adalah Indonesia harus dapat menemukan keseimbangan antara pendekatan multilateral dan bilateral. Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai *middle power* dengan tetap mengedepankan kerja sama di ASEAN juga memikirkan kepentingan domestik melalui hubungan bilateral. Pendekatan ini akan membantu Indonesia mempertahankan posisinya di ASEAN dan mempertahankan kepentingan nasionalnya lingkup internasional

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. S. Z., Haseeb, M., & Islam, R. (2016). Regional integration of the association of Southeast Asian nations economic community: An analysis of Malaysia - Association of Southeast Asian nations exports. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(2).
- Adielah, U. (2023, January 19). Tanggapan komparatif kepemimpinan SBY-Jokowi akan isu LCS. *Kompasiana*.  
<https://www.kompasiana.com/ubaidahadielah/63bcd8e297125e7bf010af62/tanggapan-komparatif-kepemimpinan-sby-jokowi-akan-isu-lcs>
- Alvian, R. A. Haluan baru politik luar negeri Indonesia: Perbandingan diplomasi 'middle power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2).
- Alvian, R. A., Putri, G. C., & Ardhani, I. (2017). Haluan baru politik luar negeri Indonesia: Perbandingan diplomasi 'middle power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2). <https://doi.org/10.18196/hi.62112>
- Aminuddin, S. A. (2022). Comparative analysis of the state speeches of President Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo using the Aristotelian perspective. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(1).
- Andika, M. T. (2016). An analysis of Indonesia foreign policy under [Jokowi]. *Indonesian Perspective*, 1(2).
- Antona-Makoshi, J., Muslim, H., Medojevic, M., Watanabe, S., Seguí-Gómez, M., & Bhalla, K. (2023). Estimated potential death and disability averted with vehicle safety interventions, Association of Southeast Asian Nations. *Bulletin of the World Health Organization*, 101(3). <https://doi.org/10.2471/BLT.22.288895>
- Arieza, U. (2023, January 29). 11 negara anggota ASEAN, berikut daftar lengkapnya. *Kompas.com*. <https://travel.kompas.com/read/2023/01/29/233733227/11-negara-anggota-asean-berikut-daftar-lengkapnya?page=2>
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. (2003). *Buku putih politik luar negeri Republik Indonesia*. [https://books.google.co.id/books/about/Buku\\_putih\\_politik\\_luar\\_negeri\\_Republik.html?id=MMRgGwAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Buku_putih_politik_luar_negeri_Republik.html?id=MMRgGwAACAAJ&redir_esc=y)
- Burgess, R. (2023). Association of Southeast Asian Nations. In *Research handbook on cartels*. <https://doi.org/10.4337/9781839102875.00037>
- Cindytia Rudianto. (2020). *Kepemimpinan strategis ala Susilo Bambang Yudhoyono*. Medium.
- Efendi, F., Nursalam, N., Kurniati, A., & Gunawan, J. (2018). Nursing qualification and workforce for the Association of Southeast Asian Nations Economic Community. *Nursing Forum*, 53(2). <https://doi.org/10.1111/nuf.12243>
- Effendi, T. D. Memahami politik luar negeri Indonesia era Susilo Bambang Yudhoyono secara komprehensif: Resensi buku. *Indonesian Perspective*, 2(1). <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3d9eee88c646fbcJmltdHM9MTcyODc3NzYwM CZpZ3VpZD0xZmI2NDgxNy0yZWY5LTZiOWYtMWQ3NC01Yjk5MmY2NTZhZjcmaW5zaWQ9NTIxMw&pntn=3&ver=2&hsh=3&fclid=1fb64817-2ef9-6b9f-1d74-5b992f656af7&psq=Politik+Luar+Negeri+Susilo+Bambang+Yudhoyono+Per>

- Enggartias Wahana Putera, S. S. Esensi hubungan internasional dan kebijakan politik luar negeri Indonesia. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/esensi-hubungan-internasional-dan-kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia/>
- Gischa, S. Bentuk kerja sama antarnegara ASEAN dan manfaat bagi bangsa Indonesia. *Kompas.com*. [https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/05/100000869/bentuk-kerja-sama-antarnegara-asean-dan-manfaat-bagi-bangsa-indonesia?lgn\\_method=google&google\\_btn=onetap](https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/05/100000869/bentuk-kerja-sama-antarnegara-asean-dan-manfaat-bagi-bangsa-indonesia?lgn_method=google&google_btn=onetap)
- Gunawan, R. SBY: Indonesia terdepan damaikan konflik Laut China Selatan. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/global/read/2048913/sby-indonesia-terdepan-damaikan-konflik-laut-china-selatan>
- Hamzah, B. A. (2015). Sinking the ships: Indonesia's foreign policy under Jokowi. *RSIS Commentary*.
- Hartiana, T. I. P., Setyarinata, A. W., & Nugraheni, Y. (2020). Citra politik Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo di media sosial. *PRofesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/prh.v4i2.21319>
- Hotez, P. J., Bottazzi, M. E., Strych, U., Chang, L. Y., Lim, Y. A. L., Goodenow, M. M., & AbuBakar, S. (2015). Neglected tropical diseases among the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): Overview and update. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 9(4). <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003575>
- Inayat, R. S. (2016). Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan politik luar negeri Indonesia. *Journal Politik LIPI*.
- Isabela, M. A. C. (2022, March 25). Ciri politik luar negeri Indonesia masa pemerintahan SBY. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/03000071/ciri-politik-luar-negeri-indonesia-masa-pemerintahan-sby>
- Kementerian Pertahanan. Enam Menhan ASEAN tandatangani perjanjian kerja sama "Our Eyes." *Kementerian Pertahanan RI*. <https://www.kemhan.go.id/2018/02/06/enam-menhan-asean-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-our-eyes-dalam-admm-retreat-2018.html>
- Mardhiyyah, I., & Suryadipura, D. (2023). Diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pada masa Kabinet Kerja 2014-2019. *Padjadjaran Journal of International Relations*.
- Peltzer, K., Yi, S., & Pengpid, S. (2017). Suicidal behaviors and associated factors among university students in six countries in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). *Asian Journal of Psychiatry*, 26. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2017.01.019>
- Powell, G. B., Dalton, R. J., & Strom, K. W. (2015). *Comparative politics today: A world view* (11th ed.). Pearson. [www.pearsonglobaleditions.com](http://www.pearsonglobaleditions.com)
- Rizky Alif Alvia, Ganesh Cintika Putri, & I. A. Haluan baru politik luar negeri Indonesia: Perbandingan diplomasi 'middle power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Saputra, A. B. (2012). Politik luar negeri Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2011. *Repository UNRI*.
- Suhendra. (2015, September 4). Ini awal Jokowi kepincut kereta cepat. *Detik.com*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3009668/ini-awal-jokowi-kepincut-kereta-cepat>

- Sulistiyani, D., & Mukaromah, M. (2018). Gaya retorika kepala negara RI: Analisis komparatif Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo. *Jurnal Audience*, 1(1). <https://doi.org/10.33633/ja.v1i1.2682>
- Utari, S., & W. (2021). National identity and foreign policy: Indonesia million friends zero enemy under Yudhoyono regime. *Proceedings of Airlangga Conference on International Relations (ACIR 2018) - Politics, Economy, and Security in Changing Indo-Pacific Region*.
- V. O. W., dkk. Kebijakan luar negeri Indonesia di negara-negara kepulauan Pasifik era Joko Widodo 2014-2019: Sebuah tindakan adaptif?
- Wedhaswary, I. D. (2015, January 29). Hari ke-20 Jokowi-JK: Lawatan perdana ke luar negeri. *Kompas.com*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2015/01/29/10474401/Hari.Ke-20.Jokowi-JK.Lawatan.Perdana.ke.Luar.Negeri>
- Widiatmaja, A., & Albab, U. (2019). Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan luar negeri di tengah dinamika lingkungan strategis regional. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional*, 10(1).